

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *SIZE PERUSAHAAN* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Pada Sektor Makanan dan Minuman
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020)**

Risti Tamala
Universitas PGRI Madiun
risti_tamala@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically prove the influence of corporate governance on tax avoidance (empirical studies on food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020). Data collection is done by means of documentation. Data collected by collecting, recording, and calculating data related to research such as data on institutional ownership, independent commissioners, audit committees, and other data needed for the research process obtained from the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020 that can accessed through www.idx.co.id. The sampling technique used is the purposive sampling method. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results of this study indicate that institutional ownership and independent commissioners have a positive effect on tax avoidance. While the variable of the influence of the audit committee has no effect on tax avoidance. The results of the moderation test show that the moderation of the firm size variable with institutional ownership and audit committee variables has a positive effect on tax avoidance. While the moderating of the firm size variable with the independent commissioner's influence variable has no effect on tax avoidance

Keywords: *institutional ownership, independent commissioner, audit committee, firm size, tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti data kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan data-data lainnya yang diperlukan untuk proses penelitian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel pengaruh komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa moderasi variabel ukuran perusahaan dengan variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan moderasi variabel ukuran perusahaan dengan variabel pengaruh komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah dapat berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan.

Pembebanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pengabdian kewajiban dan partisipasi wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara. Namun, pajak bukanlah iuran yang sifatnya sukarela melainkan iuran yang dapat dipaksakan sehingga kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan.

Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Untuk menghindari penghindaran pajak perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) agar dapat menentukan arah kinerja perusahaan yang baik dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan.

Fenomena terkait pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah atau ditingkatkan dengan optimal supaya pertumbuhan serta pembangunan negara dapat berjalan baik. Dengan demikian pemerintah berharap wajib pajak dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun, apa yang diharapkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Rendahnya penerimaan pajak yang ada di Indonesia menggambarkan bahwa harapan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya masih belum tercapai.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Praktik *tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak tidak secara pasti melanggar undang-undang akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan undang-undang.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal yang membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. *Size* dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*
5. *Size* dapat memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*
6. *Size* dapat memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Kepuasan Kerja

Ada dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangundangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Yang kedua adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga

cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yahya, Permatasari, Hidayat, dan Fahrurroji (2021) Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta hasil penelitian Wulandari (2021)) Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Herawati & Yulianti (2021) menunjukkan Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil penelitian Hasanah, Oktami, & Afdaleni (2021) Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta hasil penelitian Lestari & Ovami (2020) Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian

tersebut dapat diambil hipotesis yaitu:

H₁: Kepemilikan instutisional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan Perusahaan yang lebih objektif. Menurut (Wanudyaningrum, 2018) dalam (Gideon, 2005) menyatakan Dewan Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Jadi, semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan- tindakan para direktur eksekutif sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian aktivitas penghindaran pajak dapat menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ovami (2020) menunjukkan Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu hasil Yahya, Permatasari, Hidayat, & Fahruroji (2021) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis yaitu:

H₂: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Yang berwenang membentuk komite adalah Dewan Komisaris. Haknya ada pada Dewan Komisaris. Sifatnya fakultif, yakni dapat dibentuk. Bukan bersifat imperatif. Terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris.

Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik.

Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Wanudyaningrum, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Herawati & Yulianti (2021) menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil Purbowati (2021) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis yaitu:

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Size Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Komponen Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan monitoring terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi pihak manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi jumlah kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula jumlah kepemilikan institusionalnya, dan akan semakin rendah peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Wanudyaningrum, 2018)

H₄: *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan *tax avoidance*

Dewan komisaris independen dapat melakukan monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih objektif Tommy dan Maria (2013). Komisaris independen bertanggung jawab mendorong diterapkannya *Corporate Governance* dalam perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan komisaris independen dinilai mampu meminimalisir perilaku menyimpang manajemen seperti penghindaran pajak Yuni dan Setyawan (2019). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar jumlah dewan komisaris independen dan *tax avoidance* akan semakin rendah.

H₅: *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan *tax avoidance*

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Sekar Mayangsari, 2003). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut tentunya akan semakin besar pula, dan akan semakin rendah peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

H₆: *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Komite Audit dengan *tax avoidance*

Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan tiga indikator, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen serta *size* atau ukuran perusahaan sebagai variabel

moderasi yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen (Wanudyaningrum, 2018).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah kuantitatif. Data penelitian yang digunakan yaitu berupa laporan tahunan perusahaan sektor makanan dan minuman yang diakses dari *website* (BEI) tahun 2016-2020. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2016-2020, yaitu sebanyak 26 perusahaan terdaftar. Penelitian ini menggunakan sampel dari data laporan tahunan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, yaitu sebanyak 14 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria berikut ini:

Tabel Sampel Perusahaan

| No. | Kriteria | Jumlah |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. | Jumlah Perusahaan sektor <i>Food and baverage</i> yang <i>listing</i> di BEI tahun 2016-2020. | 26 |
| 2. | Jumlah Perusahaan sektor <i>Food and baverage</i> yang <i>listing</i> di BEI tahun 2016-2020 secara berturut. | 14 |
| 3. | Memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap selama tahun 2016-2020. | 14 |
| Periode Penelitian 2016 -2020 | | 5 |
| Total Sampel 5 X 14 | | 70 |

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah praktik penghindaran pajak, dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya antara lain sebagai berikut:

Kepemilikan Manajerial (X₁)

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris perusahaan Sartono (2010;487):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Oleh Manajemen} \times 100\%}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$$

Kepemilikan Institusional (X₂)

Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Rumus menghitung persentase kepemilikan institusional menurut Sartono (2010;487) adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional} \times 100\%}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Komisaris Independen (X₃)

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Komisaris Independen =

$$\frac{\text{Jumlah komisaris independen} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris yang ada}}$$

Komite Audit (X₄)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya (Salim, 2005). Ukuran komite audit di suatu perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Rahmawati, Rikumahu, dan Dillak, 2017):

$$\sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan memiliki komite audit maka akan diberi angka 1 dan sebaliknya akan diberi angka 0.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Firm Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS 19 diperoleh output sebagai berikut:

Tabel Uji T
Coefficients^a

| Model | t | Sig. |
|--------------|-------|------|
| 1 (Constant) | 2.947 | .564 |

| | | |
|-----------|-------|------|
| SQRT_KI2 | 3.276 | .002 |
| SQRT_DKI2 | 3.808 | .004 |
| SQRT_KA2 | 1.056 | .126 |

a. Dependent Variable: SQRT_TA2

1. Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional (KI) adalah sebesar 0.002 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berdasarkan signifikansi untuk variabel kepemilikan manajerial adalah 0.002 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan H_1 diterima. Sedangkan nilai t hitungnya adalah $3.276 >$ dari t_{tabel} yakni 1.67943. Maka didapat keputusan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil tersebut **H_1 diterima.**
2. Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen (DKI) adalah sebesar 0.004 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berdasarkan signifikansi untuk variabel dewan komisaris independen adalah 0.004 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan H_2 diterima. Sedangkan nilai t hitungnya adalah $3.808 <$ dari t_{tabel} yakni 1.67943. Maka didapat keputusan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil tersebut **H_2 diterima.**
3. Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi variabel komite audit (KA) adalah sebesar 0.126 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,126. Berdasarkan signifikansi untuk variabel komite audit adalah 1.056 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dan H_3 ditolak. Sedangkan nilai t hitungnya adalah $1.056 <$ dari t_{tabel} yakni 1.67943. Maka didapat keputusan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil tersebut **H_3 ditolak.**

Uji Moderated Regression Analysis/MRA

Hasil pengujian persamaan regresi adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji MRA

| | | |
|--------------|-------|------|
| 1 (Constant) | 7.731 | .000 |
| MODERASI_KI | 2.745 | .009 |
| MODERASI_DKI | 1.189 | .242 |
| MODERASI_KA | 3.416 | .001 |

a. Dependent Variable: SQRT_TA2

- 1) Pada penelitian ini untuk variabel kepemilikan institusional dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2.745 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka tunnelling dapat dikatakan sebagai variabel *predictor moderasi* artinya variabel yang digunakan sebagai variabel prediktor dalam hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen.
- 2) Pada penelitian ini untuk variabel komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 1.189 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,241 ($p > 0,05$), hal ini berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka tunnelling dapat dikatakan sebagai variabel *Homogolizer Moderasi* artinya variabel yang digunakan tidak memiliki hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen.
- 3) Pada penelitian ini untuk variabel komite audit dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 3.416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$), hal ini berarti variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka tunnelling dapat dikatakan sebagai variabel *predictor moderasi* artinya variabel yang

digunakan sebagai variabel prediktor dalam hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

| Model | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|
| 1 | .856 |

b. Dependent Variable: SQRT_TA2

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa besarnya *R Square* adalah 0,856, hal ini berarti 85,6 % variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit dengan moderasi ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 14,4 % (100% - 85,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Pengaruh Kepemilikan Instutional (KI) terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil penelitian ini variabel kepemilikan intistusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002 dan t_{hitung} yakni 3.276. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} atau dengan $0.002 < 0,05$, penelitian ini sesuai dan mendukung hipotesis pertama (H_1).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,

dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil penelitian ini variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0.004 dan t_{hitung} yakni 3.808. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau dengan $0.004 > 0,05$, penelitian ini sesuai dan mendukung hipotesis kedua (H_2).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku tax avoidance.

Semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian aktivitas penghindaran pajak dapat menurun.

Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil penelitian ini variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.126 dan t_{hitung} yakni 1.056. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau dengan $0.126 > 0,05$, penelitian ini tidak sesuai dan menolak hipotesis ketiga (H_3).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit di indikasikan dalam pelaksanaannya kurang di dukung oleh elemen-

elemen lain yang berada di dalam perusahaan, menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan dengan baik.

Maka banyak sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Karena tugas komite audit hanya membantu dewan komisaris independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan di sajikan dengan wajar dengan prinsip akuntansi, selebihnya keputusan berada pada pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas pada perusahaan bukan oleh komite audit.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai variabel *predictor moderasi* artinya variabel yang digunakan sebagai variabel prediktor dalam hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan mempengaruhi jumlah kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Semakin besar jumlah konsentrasi kepemilikan institusional maka akan akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan dengan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka ukuran perusahaan dapat dikatakan variabel *Homogolizer Moderasi* artinya variabel yang digunakan tidak memiliki hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa H_5 ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bahwa tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi

dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain itu kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya penghindaran pajak.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan dengan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Dengan demikian maka ukuran perusahaan dapat dikatakan variabel *predictor moderasi* artinya variabel yang digunakan sebagai variabel prediktor dalam hubungan signifikan pada variabel independen maupun dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa H_6 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut cenderung akan semakin besar pula, dan akan semakin rendah peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Moderasi variabel ukuran perusahaan dengan variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Moderasi variabel ukuran perusahaan dengan variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
6. Moderasi variabel ukuran perusahaan dengan variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi selanjutnya dapat menambahkan data dari industri perusahaan selain manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
2. Dapat menggantikan penghindaran pajak dengan proksi yang lain seperti Cash effective Tax Rate (CETR) maupun Book-Tax Difference (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, H., Dwimulyani, S., Pandu, P., & Consultant, A. (2018). *Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good*. 0832, 123–140.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21*.
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 36–49.
- Hasanah, A., & Oktami, C. (2021). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance*. 5(2), 121–131.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia*. 1(1), 1–6.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa

- Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Xviii(03), 408–421.
- Purbowati, R. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*. 4(1), 61–76.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian*.
- Wanudyaningrum, R. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderasi*.
- Wulandari, T. A. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Konstruksi Di Bursa Efek Indonesia*.
- Yahya, A., Permatasari, M. D., Hidayat, T., & Fahrurroji, M. (2021). *Tax Avoidance : Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit*. 15(02), 95–105.
- Yuliana, N., Masitoh, E., & Rachmawati, R. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan*.
- Yusuf, M., & Herawati, H. (2021). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai*. 3(1), 44–57.